

Evaluation of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving the Welfare of Beneficiary Families in Undrusbinangun Village

Ima Muhimah¹, Kinanti Dinda Azzahra², Muhamad Rafli³, Nauvira Elma Elrica⁴, Rahmawati Dwi Lestari⁵, Wahyu Nugroho⁶, Stefani^{7*}
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Corresponding Author: Stefani Stefani.nny19@mhs.uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Evaluation, Policy, Family Hope Program

Received : 09 September

Revised : 21 October

Accepted: 24 November

©2022 Muhimah, Azzahra, Rafli, Elrica, Lestari, Nugroho, Stefani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Undrusbinangun Village, Kadudampit District, Sukabumi Regency, whether the implementation of PKH so far has been in accordance with the indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of PKH beneficiaries. This research was conducted in Undrusbinangun Village, Kadudampit District, Sukabumi Regency. This study used a qualitative approach with descriptive research as the type of research used. Data collection techniques were carried out by means of field surveys, open interviews, and literature studies, as well as through data provided by related parties. The resource persons for this study were the Chairperson of the PKH Kempok Undrusbinangun Hamlet, the PKH Coordinator and the Beneficiary Families (KPM). The results of this study indicate that the use of existing resources in managing PKH in Undrusbinangun Village, Kadudampit District has been running quite efficiently, this is evidenced by the few resources used in managing PKH but this does not necessarily make PKH management a mess. , but precisely with these resources the PKH program in this village has been running quite well and consistently since 2019.

Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Undrusbinangun

Ima Muhimah¹, Kinanti Dinda Azzahra², Muhamad Rafli³, Nauvira Elma Elrica⁴, Rahmawati Dwi Lestari⁵, Wahyu Nugroho⁶, Stefani^{7*}
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Corresponding Author: Stefani Stefani.nny19@mhs.uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan

Received : 09 September

Revised : 21 October

Accepted: 24 November

©2022 Muhimah, Azzahra, Rafli, Elrica, Lestari, Nugroho, Stefani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, apakah pelaksanaan PKH selama ini telah sesuai dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan para penerima PKH. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara terbuka, dan studi literatur, serta melalui data yang diberikan oleh pihak terkait. Narasumber dari penelitian ini dari Ketua Kempok PKH Dusun Undrusbinangun, Koordinator PKH serta Keluarga Penerima manfaat (KPM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada dalam pengelolaan PKH di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit sudah berjalan cukup efisien, hal itu dibuktikan dengan sedikitnya sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan PKH namun hal itu tidak serta merta membuat pengelolaan PKH menjadi berantakan, melainkan justru dengan sumber daya tersebut program PKH di desa ini berjalan cukup baik dan konsisten sejak tahun 2019.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Bruzy & Segel, 1998). Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran. Erat hubungannya kesejahteraan dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk yang miskin, artinya berada dibawah batas garis kemiskinan di Indonesia batas itu diukur dengan nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi hidup minimumnya, baik itu kebutuhan untuk makanan maupun kebutuhan bukan untuk makanan. Kebutuhan makanan seperti beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya, sedangkan kebutuhan bukan makanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Maka dari itu peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan membuat suatu kebijakan seperti program bantuan sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*) serta bantuan juga dapat bersifat tetap, khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar (Supriyanto et al., 2014). Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan masalah kemiskinan, karena hal tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat diukur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam kemiskinan sangat menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebab salah satu faktornya adalah ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa dengan tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya (Purwanto, 2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Jawa Barat, terdapat 6,82 ribu jiwa (4,2%) penduduk Jawa Barat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2021. Sementara garis kemiskinannya sebesar Rp 427,4 ribu per kapita per bulan sedangkan untuk Kota Sukabuminya sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk miskin meningkat 8%

menjadi 27.000 orang yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada ketahanan perekonomian Masyarakat. Kartasasmita (1996) menyebutkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) di 7 provinsi 48 kabupaten/kota. Daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan juga Gorontalo dengan harapan program ini bisa berkesinambungan. PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan.

Misi besar PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam jangka pendek, dana bantuan tunai bersyarat diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Dalam jangka panjang, merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Sedangkan tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. 4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Undrusbinangun telah berjalan dari tahun 2019 sampai sekarang yang masing-masing mempunyai ketua kelompok atau pendamping PKH di setiap kedusunannya. Tugas dan fungsi ketua kelompok untuk mengkoordinasi peserta PKH apabila ada informasi terbaru mengenai pencairan bantuannya dan untuk mengumpulkan administrasi terkait PKH. Desa Undrusbinangun rata-rata pesertanya menerima bantuan pendidikan yaitu uang yang digunakan untuk bayaran SPP dan membeli perlengkapan sekolah lainnya. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah dengan suami yang bekerja tukang bangunan bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat

mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun masyarakat penerima PKH rata-rata berpendidikan rendah, namun bukan berarti mereka tidak memperdulikan pendidikan karena nyatanya mereka diberi arahan secara kontinu untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Desa Undrusbinangun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, Desa Undrusbinangun terbagi menjadi 4 kedesunan yaitu Undrus, Bojongkoneng, Kadupugur 1 dan Kadupugur 2. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi dari 4 kedesunan mempunyai masalah yang hampir sama yang mengakibatkan PKH di desa tersebut belum cukup berhasil bahwa terdapat beberapa warga yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan penghasilan sangat rendah tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga terdapat bantuan yang salah sasaran, dalam pelaksanaannya pula diperoleh informasi kurangnya sosialisasi kepada pemerintah setempat. Selain itu proses pendampingan masyarakat peserta program keluarga harapan belum optimal. kemudian pola pikir masyarakat yang belum mandiri sehingga masyarakat hanya menerima tanpa mau berusaha bekerja. Hal tersebut dimaksudkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan yang diberikan bahkan beberapa masyarakat yang sudah mampu juga masih menikmati bantuan yang diterima.

Dalam pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Namun selama ini belum ada evaluasi secara menyeluruh, sehingga belum diketahui sejauh mana keberhasilan PKH di Desa Undrusbinangun ini berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. Inilah alasan yang cukup menarik bagi penulis perlu melakukan sebuah kajian evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Undrusbinangun. Dalam proses menggali keberhasilan program, maka peneliti akan melihat dari aspek konteks, input, proses, dan output program yang sudah berjalan. Dengan begitu, harapannya akan muncul satu persepsi baru mengenai PKH dapat mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang adanya masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui, mendalami, dan menganalisis Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Undrusbinangun dengan judul penelitian "Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Undrusbinangun."

PELAKSAAN DAN METODE

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu situasi yang menggambarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang seperti sandang, pangan, papan, Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Penyebab kemiskinan ialah terbatasnya alat dan bahan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pemikiran mengenai sebuah kemiskinan juga selalu berubah-ubah,

namun yang tetap dalam kontekstual yang sama, bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikkelsen, 2011). Adapun beberapa pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli, diantaranya:

- Soerjono Soekanto mendefinisikan kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana individu tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup masyarakat yang semestinya selain itu ia juga tidak mampu menggunakan mental dan fisiknya dalam masyarakat tersebut.
- Gillin dan Gillin mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana seseorang dan keluarganya tidak dapat mempertahankan skala hidup yang sesuai untuk memberikan efisiensi fisik dan mental agar dapat menjalankan fungsinya sesuai standar yang terdapat dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi baik itu seseorang maupun kelompok yang tidak terpenuhi hak-hak dasar yang seharusnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 juga menjelaskan tentang kemiskinan namun lebih terkhusus kepada subjek kemiskinan tersebut yakni fakir miskin, fakir miskin merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan utama yang layak sebagai manusia ataupun orang yang memiliki pekerjaan namun tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan utama sebagai manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat. Sedangkan kemiskinan sementara (*transient poverty*) disebabkan oleh (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Berdasarkan (Prawoto et al., 2009), disebutkan bahwa kemiskinan dikategorikan menjadi tiga dimensi yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan juga kemiskinan kultural. Seorang individu dapat dikategorikan miskin absolut jika pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan untuk miskin relatif yakni berada pada atas garis kemiskinan namun menunjukkan di bawah jika dilihat melalui lingkungan sekitarnya. Lalu untuk miskin kultural dilihat melalui perilaku seseorang ataupun masyarakat yang

telah diberikan pertolongan untuk memperbaiki kehidupannya namun enggan untuk berusaha melakukannya.

Indikator Kemiskinan

Untuk dapat mengetahui seberapa jauh indikator kemiskinan, BPS sendiri mengukur hal tersebut menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat melalui ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu kebutuhan pangan dan non pangan berdasarkan pengukuran pengeluarannya, pengeluaran tersebut dilihat dari per kapita per bulan. Perhitungan tersebut dilakukan melalui perhitungan jumlah penduduk yang tidak mampu untuk konsumsi barang dan jasa dengan nilai ekuivalen 20 kg beras per kapita per bulan untuk wilayah desa dan 30 kg beras per kapita per bulan untuk wilayah kota ditambah dengan pengeluaran kebutuhan non pangan (Nurwati, 2008). Sedangkan untuk standar kemiskinan menurut bank dunia adalah seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari dua dollar AS per hari.

Program Pengentasan Kemiskinan

Sejak deklarasi kemerdekaan dilakukan, telah banyak sekali kebijakan yang diciptakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun secara garis besar kebijakan mengatasi kemiskinan dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kebijakan yang di khususkan untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang di khususkan untuk masyarakat miskin seperti bantuan beras miskin pada tahun 2007, Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2006 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pada tahun 2007. Sedangkan kategori kebijakan yang ke dua adalah kebijakan yang tidak hanya difokuskan kepada masyarakat miskin melainkan juga kepada masyarakat umum, meskipun masyarakat miskin tetap menjadi prioritas utama. Contoh kebijakan ini adalah pengadaan obat generik dalam bidang kesehatan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Bappenas, 2007).

Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang kemudian dijadikan kata serapan dalam bahasa Indonesia untuk mempertahankan kata aslinya dengan istilah "Evaluasi", sehingga sampai saat ini istilah evaluasi menjadi hal yang tidak asing dalam bahasa Indonesia. Menurut (Purwanto, 2013), evaluasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil pengukuran sehingga pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling berkesinambungan. Sedangkan Wirawan (2011) menyatakan bahwa Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan dan penyajian informasi mengenai objek yang dievaluasi, yang kemudian dinilai dengan standar evaluasi dan hasil penilaian tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan terhadap objek yang dievaluasi (Ambiyar & Muharika, 2019).

Sedangkan untuk istilah “program” mengandung dua definisi baik itu secara khusus maupun secara umum. Untuk definisi secara umum, program dapat didefinisikan sebagai “rencana”. Jika ada seorang guru bertanya kepada seorang muridnya, apa program yang akan kamu jalani setelah lulus sekolah ini, maka “program” tersebut adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan siswa tersebut setelah lulus nanti, rencana tersebut bisa berupa melanjutkan pendidikan, bekerja, membantu orangtua, atau belum memikirkan apapun. Sedangkan jika “program” dikaitkan langsung dengan evaluasi program, maka program adalah suatu unit kegiatan yang merupakan wujud dari implementasi suatu kebijakan, berlangsung secara berkelanjutan di dalam suatu organisasi yang berisi sekelompok orang (Arikunto, S., 2004). Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah kegiatan atau objek telah tercapai, yang mana hasil tersebut akan dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan terhadap objek yang di evaluasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun website. Proses keabsahan data yang menggunakan triangulasi dan hasil wawancara mendalam serta observasi dengan Kepala Desa Undrusbinangun, ketua kelompok PKH dan juga penerima manfaat PKH di Dusun Undrus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Undrusbinangun, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan waktu pelaksanaan di bulan Juli - Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yakni purposive sampling dengan informan yang terdiri dari Ketua Kelompok PKH dari Dusun Undrus dan Keluarga Penerima Harapan di Desa Undrusbinangun (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian, maka tim peneliti melakukan analisis evaluasi terhadap adanya program keluarga harapan di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Dimana dengan adanya evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang dapat mengukur sejauh mana program pemerintah pusat tersebut terimplementasikan di desa tersebut. Lebih jauh dari itu dalam upaya evaluasi program ini, tim peneliti menggunakan enam indikator evaluasi yang meliputi: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai enam indikator evaluasi terkait implementasi program keluarga harapan di Desa Undrusbinangun tersebut.

1. Efektivitas

Indikator efektivitas bertumpu pada tujuan adanya kebijakan. Maka pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan sebuah harapan dapat tercapai tujuan yang sudah ditetapkan, yang nantinya kebijakan itu

bisa dianggap efektif. Jika hasil dari pelaksanaan kebijakan belum mampu mencapai tujuan kebijakan, maka bisa disimpulkan bahwa masih terdapat masalah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Sejak dilaksanakan mulai tahun 2019 sampai sekarang, pencapaian PKH di Desa Undrusbinangun khususnya bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM dengan cara akses layanan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) memang memberikan bantuan uang dan juga edukasi untuk keperluan pendidikan. Hal tersebut tentu bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah agar bisa mengakses layanan pendidikan. Tujuan pertama ini telah terwujud di Desa Undrusbinangun. Mayoritas Masyarakat Desa Undrusbinangun telah merasa terbantu untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA dengan dana bantuan PKH.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Pemberian bantuan sosial PKH telah terbukti mampu mengurangi beban pengeluaran KPM PKH Desa Undrusbinangun. Masyarakat peserta PKH telah merasakan keringanan pengeluaran biaya pendidikan anak mereka. Sehingga nantinya mereka bisa memiliki harapan lebih untuk menyekolahkan anak mereka sampai lulus SMA atau MA sederajat. Bahkan akan lebih baik lagi jika anak mereka termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, PKH juga memberikan edukasi tentang kewirausahaan yang mana bisa memberikan wawasan kepada KPM untuk memulai usaha. Jika KPM mau mempraktikkan materi kewirausahaan yang disampaikan, tentu bisa menambah penghasilan keluarga, akan tetapi hal tersebut masih belum terwujud di Desa Undrusbinangun. Masyarakat mengatakan sulit untuk memulai usaha, sehingga mereka enggan menggunakan uang bantuan untuk memulai usaha. Masyarakat juga mengaku bahwa dana bantuan PKH yang terpenting adalah untuk anak sekolah.
- 3) Menumbuhkan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan. Bantuan sosial PKH merupakan bantuan sosial bersyarat, yang mana bagi peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi komitmen sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima. Apabila peserta tidak memenuhi komitmen mereka, maka bantuan yang diberikan akan ditanggguhkan atau bahkan sampai dicabut. Kewajiban tersebut tentu pada akhirnya akan menciptakan perubahan perilaku pada peserta PKH. Bagi peserta dengan komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah, mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Selain itu, bagi ibu-ibu peserta PKH juga diberikan edukasi pada kegiatan Full Day School PKH. Kegiatan tersebut

mengajarkan pada orang tua agar bersikap baik kepada anak, sehingga anak tidak sampai merasa tertekan dan tetap semangat untuk belajar. Di Desa Undrusbinangun, hal tersebut sudah cukup terwujud, meskipun ada beberapa peserta yang sulit untuk diingatkan. Hampir semua peserta telah sadar bahwa kebutuhan pendidikan untuk anak itu juga penting agar masa depan mereka bisa lebih baik.

- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Tujuan keempat dari PKH ini masih belum terwujud di Desa Undrusbinangun. Masyarakat lebih terfokus pada biaya pendidikan anak. Sebagian besar dari mereka enggan menggunakan dana bantuan untuk membuka usaha yang mana bisa membantu mereka segera keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan PKH di Desa Undrusbinangun sudah cukup efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan. Hanya saja penyampaian materi pada kegiatan Full Day School dinilai kurang efektif karena terkesan sedikit membosankan. Masyarakat hanya dimintai membaca dan mendengarkan materi yang disampaikan. Padahal, pendamping seharusnya juga bisa menyampaikan dengan cara yang sedikit berbeda, misalnya praktik langsung pada saat kegiatan. Misalkan pada materi "Cara Mengasuh Anak dengan Baik", kita bisa meminta seorang peraga dari peserta, sebelum menyampaikan isi materi kita bertanya terlebih dahulu "Jika anak kita menangis karena bertengkar dengan saudaranya, apa yang akan ibu lakukan?". Berdasarkan pertanyaan tersebut kita mungkin bisa tahu jawaban yang beragam, dan jika ada yang kurang tepat, kita bisa memberikan pengarahannya yang benar. Kemudian cara yang kedua, pendamping juga bisa memberikan cerita-cerita motivator yang bisa memotivasi para orang tua agar mendukung anaknya untuk lebih semangat belajar.

2. Efisiensi

Terkait efisiensi sendiri penilaiannya tidak lepas dari penggunaan sumber daya-sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan atau secara sederhana suatu program dapat dikatakan berjalan efisien bilamana sumber daya yang digunakan sedikit namun program tetap dapat berjalan secara maksimal. Berkenaan dengan hal itu pula pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Undrusbinangun setidaknya meliputi sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya sarana dan prasarana.

1) Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan hal ini tim peneliti tidak bisa memastikan secara pasti mengenai berapa pendamping yang menangani KPM, namun berdasarkan keterangan yang diperoleh pengelolaan sumber daya manusia di Desa Undrusbinangun cukup rapi dan

terstruktur dalam hal koordinasi penyaluran informasi PKH ini. Lebih jauh dari itu setiap dusun yang ada di desa tersebut setidaknya memiliki beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok tersebut memiliki ketua, dimana tugas ketua disini tak lain ialah untuk mempermudah akses dan jalur koordinasi. Dimulai dari pendamping ke setiap ketua kelompok PKH di setiap dusun lalu dari ketua kelompok PKH setiap dusun tersebut menyampaikan kepada masing-masing anggota kelompok. Melalui mekanisme yang terstruktur ini maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di desa tersebut dapat dikatakan baik dan efisien sehingga tidak perlu melibatkan banyak sumber daya manusia yang ada.

2) Sumber Daya Waktu

Masyarakat penerima PKH di Desa Undrusbinangun cukup rutin melakukan pertemuan atau koordinasi baik antar anggota kelompok, ketua kelompok maupun pendamping PKH. Adanya pertemuan tersebut biasanya di inisiasi oleh pendamping yang mengabarkan kepada setiap ketua kelompok beberapa hari sebelum waktu pertemuan. Selain inisiasi dari pendamping PKH, masyarakat juga tak jarang menghubungi ketua kelompok untuk bertanya atau menyampaikan keinginannya kepada pendamping melalui media WhatsApp. Dimana dengan begitu komunikasi yang terjalin cukup efektif mengingat segala pertemuan dan koordinasi berasal dari satu jalur yang sama, selain untuk menghindari miskomunikasi dan mispersepsi juga untuk memperkecil penggunaan waktu sebagai salah satu poin penilaian efisiensi.

3) Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan informasi diatas maka diketahui bahwa antara pendamping dan penerima PKH tak jarang melakukan pertemuan untuk saling memberi informasi atau setidaknya untuk saling berkoordinasi, dimana dari setiap pertemuan tersebut pula tentunya dibutuhkan berbagai media pelengkap seperti kebutuhan ruangan pertemuan, alat tulis kantor (ATK), bahkan hingga hal paling sederhana seperti konsumsi pertemuan. Yang mana sarana dan prasarana tersebut umumnya disediakan oleh desa, adapun untuk ATK dan konsumsi berasal dari iuran masyarakat penerima PKH secara sukarela yang dihimpun oleh ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok disini tak jarang juga menyediakan dan meminjamkan beberapa alat kebutuhan lain seperti laptop milik pribadinya untuk melakukan penyampaian data informasi dari pendamping PKH kepada para penerima PKH. Sehingga dalam hal penyediaan sumber daya sarana dan prasarana sendiri dapat dikatakan cukup efisien.

Dari informasi diatas kurang lebih dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada dalam pengelolaan PKH di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit sudah berjalan cukup efisien, hal itu dibuktikan dengan sedikitnya sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan PKH namun hal itu tidak serta merta membuat pengelolaan PKH mencari berantakan, melainkan justru dengan sumber daya tersebut program PKH di desa ini berjalan cukup baik dan konsisten sejak tahun 2019.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan berkaitan dengan bagaimana hasil dari kebijakan dapat mengatasi masalah yang dialami masyarakat. Sehingga suatu kebijakan dapat dikatakan memenuhi kriteria kecukupan apabila hasil dari suatu kebijakan mampu mengatasi masalah yang ada sebelum kebijakan diterapkan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH merupakan inovasi dari program bantuan sebelumnya yang dinilai kurang berhasil untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih maju. Kebijakan PKH juga bisa dikatakan memenuhi indikator kecukupan apabila dengan adanya PKH tidak akan ada lagi masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya atau anak putus sekolah karena kurangnya biaya pendidikan. Kemudian kebijakan PKH juga bisa dikatakan telah memenuhi kriteria kecukupan apabila dengan adanya bantuan PKH dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk biaya pendidikan. Bantuan sosial PKH juga mewajibkan peserta PKH komponen pendidikan untuk hadir pada kegiatan belajar minimal 85%. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat anak-anak peserta menjadi lebih rajin belajar. Hasil evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Undrusbinangun dinilai kurang memenuhi Indikator kecukupan. Meskipun bantuan PKH bisa mengatasi masalah biaya pendidikan, tetapi bantuan PKH belum sepenuhnya mengatasi masalah keuangan keluarga. Hal tersebut dikarenakan beberapa peserta lebih memilih berhutang untuk menutupi kebutuhan yang kurang. Padahal jika peserta berhutang juga akan menambah beban keuangan keluarga. Pemenuhan keuangan untuk masa depan bisa berkurang karena harus membayar hutang.

4. Pemerataan

Indikator pemerataan bisa juga diartikan sebagai keadilan, di mana setiap kelompok sasaran dari kebijakan mendapat hak yang sesuai. Indikator pemerataan pada pelaksanaan PKH di Desa Ubdrusbinangun dapat dilihat pada penyebaran bantuan sosial PKH kepada setiap masyarakat miskin. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Undrusbinangun, pelaksanaannya dinilai masih belum memenuhi Indikator pemerataan. Hal tersebut dikarenakan masalah ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Pihak desa yang lebih mengerti tentang kondisi di lapangan sering mengeluhkan data dari pusat yang tidak kunjung diperbarui, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tergolong mampu tetapi masih mendapat bantuan sosial PKH. Hal

tersebut tentu bisa memicu timbulnya kecemburuan sosial pada masyarakat. Beberapa masyarakat yang tergolong miskin juga pernah melakukan protes kepada pihak desa karena merasa lebih berhak.

5. Responsivitas

Kriteria responsivitas merupakan tanggapan dari kelompok sasaran mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan, tanggapan itu bisa berupa respon positif maupun respon negatif. Responsivitas pada pelaksanaan PKH di Desa Undrusbinangun mendapat respon yang cukup positif dari pihak pelaksana maupun masyarakat peserta PKH. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum yang dipahami masyarakat tentang bantuan sosial PKH adalah bantuan untuk sekolah anak, kesehatan dan lansia. Mereka memprioritaskan bantuan yang diterima untuk biaya sekolah anak mereka. Sejak awal menerima bantuan sosial PKH para peserta PKH mengaku senang. Meskipun bantuan yang diberikan bukanlah bantuan penuh, mereka sudah bersyukur karena dengan adanya bantuan bisa meringankan beban pengeluaran keluarga. Mereka juga berharap bahwa bantuan sosial PKH akan berjalan terus. Pihak desa juga berharap bahwa untuk ke depannya pelaksanaan harus lebih diperbaiki terutama masalah data.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan merupakan pernyataan mengenai apakah pemilihan alternatif kebijakan yang dicapai dapat benar-benar bermanfaat bagi kelompok sasaran. Kriteria ketepatan juga menyatakan bahwa pemilihan alternatif yang ditentukan bisa memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kebijakan akan dinilai sudah tepat apabila alternatif yang ditentukan memberikan dampak positif. Sedangkan kebijakan akan dinilai kurang tepat apabila alternatif yang ditentukan malah memberikan dampak negatif, sehingga perlu membuat alternatif baru. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan PKH di Desa Undrusbinangun dinilai belum memenuhi kriteria ketepatan. Masyarakat memang merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial PKH. Bantuan tersebut bisa meringankan beban pengeluaran keluarga. Selain itu, dengan adanya bantuan sosial PKH anak-anak peserta PKH juga memiliki harapan dan kesempatan lebih untuk melanjutkan sekolah, setidaknya sampai lulus SMA. Namun demikian, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya bermanfaat untuk peserta.

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar peserta PKH masih enggan untuk memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan pendapatan keluarga, misalnya melalui kewirausahaan. Materi yang mereka dapatkan dari kegiatan Full Day School tentang kewirausahaan masih belum dipraktikkan di rumah. Hanya beberapa termasuk Ibu yeon yang sudah berusaha untuk mencoba membangun dan mempertahankan usaha yang dimiliki. Peserta lain berpendapat bahwa untuk memulai usaha itu sulit. Materi-materi seperti membuat catatan kas

harian juga masih belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sibuk dengan urusan rumah tangga. Padahal jika masyarakat mampu merubah pola pikir menjadi lebih maju, mereka akan berusaha memanfaatkan bantuan yang diterima agar kemudian bisa menambah pendapatan keluarga. Dengan demikian, mereka bisa segera keluar dari garis kemiskinan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan membuat suatu kebijakan seperti program bantuan sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*) serta bantuan juga dapat bersifat tetap, khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar. Bantuan sosial PKH merupakan bantuan sosial bersyarat, yang mana bagi peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi komitmen sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima. Melalui mekanisme yang terstruktur ini maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di desa tersebut dapat dikatakan baik dan efisien sehingga tidak perlu melibatkan banyak sumber daya manusia yang ada.

Sumber Daya Waktu Masyarakat penerima PKH di Desa Undrusbinangun cukup rutin melakukan pertemuan atau koordinasi baik antar anggota kelompok, ketua kelompok maupun pendamping PKH. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada dalam pengelolaan PKH di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit sudah berjalan cukup efisien, hal itu dibuktikan dengan sedikitnya sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan PKH namun hal itu tidak serta merta membuat pengelolaan PKH mencari berantakan, melainkan justru dengan sumber daya tersebut program PKH di desa ini berjalan cukup baik dan konsisten sejak tahun 2019. Masyarakat berharap bahwa bantuan sosial PKH akan berjalan terus. Pihak desa juga berharap bahwa untuk ke depannya pelaksanaan harus lebih diperbaiki terutama masalah data.

Dalam mencapai tujuan PKH di bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan status pendidikan anak usia sekolah, mengurangi tingkat pekerja anak, anak jalanan, putus sekolah, dan menjaga kesehatan janin ibu dan kesehatan balita, diperlukan kerja keras pendamping PKH di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit. Perlu dilakukan sosialisasi, motivasi, dan pengetahuan serta informasi tanpa bosan akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, sehingga kesadaran dan perubahan perilakudari peserta/penerima PKH terbangun. Perlu juga dilakukan pemutakhiran data secara benar agar tidak terjadi permasalahan data sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit. Hal tersebut dilakukan

untuk mengurangi masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima program PKH, tetapi masih belum mendapatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan serta saran dalam penyusunan artikel ini. Terima Kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan pembaca yang telah membaca, memberikan kritik dan saran, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar, & Muharika, D. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S., & Cepi Abdul Jabar, S. (2004). *Evaluasi Program Perndidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bappenas. (2007). *Penggunaan Hasil Evaluasi: Cara Meningkatkan Program-Program yang Berpihak pada Rakyat Miskin*. <http://bappenas.go.id/>.
- Kartasasmita. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan*. In Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan. Terjemahan: M.Nalle. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1. <https://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>
- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). *Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Purwanto. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Segel & Bruzy. (1998). *Social Welfare Policy, Program, and Practice*. Itasca. IL: Peacock.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, R., Ramdhani, E., & Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan Sosial Di Indonesia : Tantangan Dan Arah Kedepan*. Jakarta : Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Zaman, Nur, dkk. (2021). *Sumber Daya Dan Kesejahteraan Masyarakat*. 1st edn. Edited by A. Karim and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.